

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, ekonomi berbasis syariah hadir seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia. Sebab, datangnya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Rusia, dan India.¹ Implementasi ajaran Islam tentang *tijarah* telah ditunjukkan oleh para pembawa Islam tersebut, yang kemudian berkelanjutan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam berikutnya. Praktik ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami *trend* positif sejak lebih kurang dua dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kaffah* dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat.

Sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sumber utama sistem ini adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Ia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan

¹ Marwati Joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 163.

menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.²

Terdapat keterikatan yang erat antara mewujudkan tujuan ekonomi syariah dan *maqashid syariah*. Dalam hal ini rumusan tujuan ekonomi syariah yang sesuai dengan syariat agama Islam juga menganut kepada *maqashid syariah* sebagai tujuan dari perekonomian.

Sektor perbankan merupakan institusi yang mempunyai peranan penting dalam menunjang proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan atau sering juga disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.³

Perbankan syariah sudah sepatutnya menjadi bisnis keuangan yang lebih mengedepankan moral, etika, kejujuran, keadilan dan kemaslahatan bila dibandingkan keuntungan finansialnya, walaupun sebagai entitas bisnis keuntungan merupakan salah satu tujuan. Akan tetapi, faktanya menunjukkan bahwa tujuan bank syariah sebagian besar masih berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social based*).⁴ Bank syariah tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan

² Umer Chappra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwani Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 146.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1.

⁴ <http://economy.okezone.com/read/2016/08/22/320/1469986/pertumbuhan-perbankan-syariah-di-indonesia-menurun>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 19.35).

oleh syariah (*Islamic Law*). Tujuan ekonomi syariah seharusnya menjadi panduan bagi tujuan keuangan dan perbankan Islam. Empat tujuan ekonomi syariah menurut Chapra adalah mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam; menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal; pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan; serta menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.⁵ Bank syariah dapat menjadi pihak yang aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Selain itu, dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”⁶ Bank syariah sebagai agen pembangunan merupakan tumpuan ekonomi bangsa untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui fungsi intermediasinya. Adapun tujuan tersebut dapat dicapai bank syariah melalui kegiatan penyaluran pembiayaan produktif. Hal ini karena pembiayaan produktif mampu menggerakkan sektor riil sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran. Dengan demikian, bank syariah menjadi solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan baik itu kebutuhan yang bersifat primer maupun sebagai modal untuk usaha.

⁵ Umer Chapra, *Op.Cit.*,

⁶ Pasal 3, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank syariah dikenal sebagai bank bagi hasil⁷ dan hampir seluruh model teoritis bank syariah didasarkan pada *mudharabah* atau *musyarakah* atau pada keduanya, tetapi hingga saat ini praktik nyata pada bank syariah masih jauh dari model tersebut. Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan pembiayaan produk *murabahah*, sedangkan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sangat sedikit diterapkan.⁸ Demikian pula yang terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Desember 2016, tercatat bahwa secara keseluruhan skema piutang (*murabahah*, *istishna'* dan *qardh*) memiliki porsi paling dominan pada sisi pembiayaan (*financing*) bank syariah di Indonesia yaitu sebesar Rp145,1 trilyun atau 58%, ini berarti bahwa lebih dari separuh pembiayaan yang diberikan bank syariah masih didominasi oleh skema piutang. Porsi *financing* pada skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) hanya tercatat sebesar Rp.94,7 trilyun atau 38%. Sedangkan Skema Piutang Sewa (*ijarah*) hanya sebesar Rp9,1 trilyun atau 4%.⁹

Masih dominannya produk pembiayaan *murabahah* menyebabkan bank syariah mendapatkan kritikan tajam dari para praktisi ekonomi Islam berkaitan dengan operasional bank syariah yang mirip dengan bank yang operasionalnya

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm, 203.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah: Strategi Memaksimalkan Return Dan Meminimalkan Return*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 1-2.

⁹ OJK, *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2016*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2016.aspx>, (diakses pada 29 Maret 2017, pukul 16.22 WIB).

berdasarkan pada bunga.¹⁰ Selain itu, tingginya porsi penyaluran pembiayaan *murabahah* membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dibandingkan sektor riil, oleh sebab pembiayaan *murabahah* pada umumnya bersifat konsumtif, sehingga tidak selaras dengan tuntutan ekonomi syariah yang mengutamakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Inilah yang menjadi permasalahan dibalik perkembangan menggembirakan perbankan syariah sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah untuk lebih fokus pada produk pembiayaan dengan skema bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Apabila realisasinya dapat dimaksimalkan, maka pembiayaan *mudharabah* dapat berkontribusi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan produktif.

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).¹¹ Kedudukan LKMS yang antara lain direpresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum syariah. Salah satu diantaranya yaitu BPRS Artha Fisabilillah di bawah manajemen PT. BPR Syariah Artha Fisabilillah.

BPRS Artha Fisabilillah merupakan lembaga keuangan syariah yang salah satu kegiatan operasional pembiayaannya menyalurkan produk pembiayaan dengan

¹⁰ http://www.kompasiana.com/hamkahuseinhs/bank-syariah-yang-masih-kurang-konsisten_589ca52820afbd5e1690b000, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 19.45).

¹¹ M Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Abadi Publishing, 2003), hlm. 79.

akad *mudharabah*. BPRS Artha Fisabilillah berlokasi di Jl. Raya Bandung No.75 Sadewata Kabupaten Cianjur. Seperti halnya institusi perbankan syariah pada umumnya, BPRS Artha Fisabilillah melakukan fungsinya sebagai perantara keuangan dengan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip syariah. Hanya saja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring, transfer, inkarso dan cek.¹²

Selama perjalanan operasionalnya, kegiatan penyaluran pembiayaan BPRS Artha Fisabilillah telah mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan studi awal terhadap neraca keuangan lima tahun terakhir pada laporan triwulanan BPRS Artha Fisabilillah didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pembiayaan BPRS Artha Fisabilillah Tahun 2011 – 2016

Penyaluran Dana	Jumlah	Prosentase
<i>Murabahah</i>	Rp209.065.975.000	99,912%
<i>Musyarakah</i>	Rp180.075.000	0,086%
<i>Mudharabah</i>	Rp2.079.000	0,0009%

Sumber : Neraca 2011 - 2016 BPRS Artha Fisabilillah Cianjur, 31 Desember 2016 (diolah kembali)

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa aset pembiayaan BPRS Artha Fisabilillah didominasi oleh produk pembiayaan *murabahah* sebesar Rp209.065.957.000 dengan prosentase sebesar 99,912% dari total pembiayaan. Kemudian *musyarakah* sebesar Rp180.075.000 atau 0,086%, sisanya sebesar Rp2.079.000 dengan prosentase terpaut sangat jauh yaitu hanya 0,0009% dari total pembiayaan yang disalurkan BPRS Artha Fisabilillah pada periode tersebut.

¹² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1, ayat (9).

Statistik penyaluran pembiayaan *murabahah* selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, realisasi pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan memprihatinkan. Selama periode lima tahun terakhir (2011-2016) tercatat hanya terjadi realisasi per bulan Maret 2011 sebesar Rp2.079.000 atau hanya 0,0009% dari total pembiayaan yang disalurkan selama periode tersebut. Terhitung dari sejak realisasi tersebut, BPRS Artha Fisabilillah tidak mencatatkan adanya realisasi pembiayaan *mudharabah*, dengan kata lain terjadi ketidakaktifan penyaluran pembiayaan *mudharabah* hingga diterbitkannya laporan triwulan per bulan Desember 2016.

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan tidak berjalannya realisasi pembiayaan *mudharabah* selama periode tersebut meliputi besarnya risiko yang harus ditanggung pihak bank, rendahnya tingkat keuntungan dibandingkan produk pembiayaan lain, serta kurangnya sumber daya yang dimiliki bank untuk memasarkan dan melaksanakan produk tersebut yang berakibat pada kecilnya tingkat peminatan nasabah terhadap produk *mudharabah*.

Keadaan tersebut terlihat dilematis karena produk pembiayaan *mudharabah* sebagai *core product*¹³ bank syariah merupakan tulang punggung bank syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasinya sebagai bank bagi hasil¹⁴. Di sisi lain, bank syariah dituntut untuk bisa membawa misi sosial (*social-based*) bagi masyarakat salah satunya dengan cara menyalurkan pembiayaan produktif.

¹³ Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 179.

¹⁴ Adiwarman Karim, *Op.cit.*,

B. Rumusan Masalah

Implementasi sistem ekonomi syariah pada bank syariah menimbulkan konsekuensi tersendiri berupa kewajiban untuk melaksanakan misi sosial. Hal ini senada dengan tujuan dari didirikannya bank syariah sebagaimana tertuang pada pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dan mengupayakan terciptanya pemerataan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Namun demikian, porsi penyaluran pembiayaan produktif yaitu *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah tercatat hanya sebesar 0,0009% dari total pembiayaan yang disalurkan selama periode tahun 2011-2016. Selain itu, terjadi ketidakaktifan realisasi pembiayaan *mudharabah* dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut menggambarkan adanya suatu ketidakselarasan yang perlu diupayakan pembenahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur?
2. Apa penyebab tidak berjalannya realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur dalam periode lima tahun terakhir?
3. Bagaimana harmonisasi tujuan ekonomi syariah dan tujuan bank syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur dalam periode lima tahun terakhir.
3. Untuk mengetahui harmonisasi tujuan ekonomi syariah dan tujuan bank syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dinamika pembiayaan *mudharabah* baik yang bersifat teoritik maupun praktis

- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang memuat penelitian tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu skripsi yang ditulis Desti Anggraeni (2005) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan *mduharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri, bahwa faktor *profit* atau tingkat keuntungan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁵

Jurnal tentang manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah oleh Abdul Aziz, bahwa risiko pembiayaan pada produk *mudharabah* memang dirasa sangat riskan, terutama bagi lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal*. Di sisi lain bagi pihak nasabah sebagai *mudharib*

¹⁵ Desti Anggraeni, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)*”. Skripsi Universitas Jakarta, 2008.

dihadapkan pada risiko yang lebih ringan. Namun demikian, lembaga keuangan syariah harus berani untuk dapat menerapkan aplikasi pembiayaan ini, karena secara syar'i lebih dapat memberikan kemashlahatan lebih besar. Selain itu, produk *mudharabah* merupakan bagian penting dari lembaga keuangan syariah yang merupakan *icon* dari perkembangan dan pertumbuhan lembaga berbasis Islam. Karenanya, adalah suatu keniscayaan bagi lembaga tersebut untuk memberikan produk pembiayaan kepada masyarakat.¹⁶

Skripsi tentang analisis akad *mudharabah* pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat oleh Rani Ernawati (2012). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa hadirnya produk pembiayaan *mudharabah* melalui BMT dapat membantu memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kewirausahaan yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Kehadiran BMT dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sekitar, khususnya yang menjalankan usaha terutama yang menemui kendala permodalan dalam usahanya. Dengan disalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat, pelaku usaha akan mendapat tambahan modal sehingga mampu meningkatkan produksi dan kinerja yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan.¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah". Dalam Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tt.

¹⁷ Rani Ernawati, "Analisis akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)", Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Skripsi tentang analisis pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas (*profit margin*) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar oleh Agusipian (2012). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari total realisasi pembiayaan produktif, kontribusi produk pembiayaan *mudharabah* sebesar 26,39%, sehingga prosentase perolehan nilai tersebut apabila diukur dengan standarisasi produktifitas sebesar 50% maka angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan *mudharabah* berada di bawah standar produktifitas yang ditentukan atau dengan kata lain pembiayaan tersebut masih kurang produktif. Berdasarkan hasil uji *r square* bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dalam artian semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada *mudharib* maka semakin besar tingkat *profit margin* yang diperoleh pihak bank.¹⁸

Skripsi tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri oleh Rifka Annisa (2017). Berdasarkan uji *t* menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.¹⁹

¹⁸ Agustian, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Profit Margin*) pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2012.

¹⁹ Rifka Annisa, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada jenis variabel, objek akad dan lokasi penelitian, di mana penulis meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah* serta hamonisasinya dengan tujuan ekonomi syariah dan tujuan bank Syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan dan lokasi penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

2. Kerangka Pemikiran

Bank syariah memiliki peranan yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa bank syariah dapat menjadi solusi atas kesulitan ekonomi saat ini. Prinsip syariah pada bank syariah merupakan cerminan dari ekonomi Islam yang senantiasa memprioritaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang ditujukan untuk mencapai kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi, berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.²⁰

Fungsi bank syariah sebagai media penyalur pembiayaan berperan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam. Tujuan dari pembiayaan perbankan Islam adalah agar pembiayaan *mudharabah* dan

²⁰ Blue Print Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003, hlm. 13.

musyarakah tersedia dalam jumlah yang cukup wajar bagi sebanyak-banyaknya pengusaha.²¹ Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam hal ini dengan akad *mudharabah*, merupakan *core product* bank syariah.²² Pembiayaan jenis ini pun sekaligus menjadi pembeda dengan bank konvensional yang berdasarkan atas bunga.²³

Pembiayaan tersebut (*mudharabah*) dirasa sangat cocok diaplikasikan untuk pembiayaan sektor riil khususnya usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak akan merasa terbebani. Beban yang dimaksud adalah tidak diwajibkannya jaminan²⁴ dalam hal peminjaman dalam pembiayaan. Prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam perbankan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan. Semua itu karena pendapatan berasal dari hasil yang dilakukan atas dasar beberapa prinsip, seperti keuntungan diperoleh dari investasi dan bukan dari sesuatu kegiatan yang bersifat *gambling* (perjudian), produktivitas yang terjadi karena dana dalam bank syariah mengalir ke dalam sektor usaha riil, dan moralitas (akhlak) yang terletak pada larangan membiayai hal-hal yang bersifat tidak riil (spekulasi) serta merusak dimensi jasmani, rohani, dan lingkungan. Selain itu secara umum pelaksanaan

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 22.

²² Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 179.

²³ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁴ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.”

sistem bagi hasil adalah manifestasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah.²⁵ Sehingga dapat dikatakan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* yang peruntukannya untuk pembiayaan produktif berperan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan secara adil sesuai dengan tuntutan syariah. Namun kecenderungan yang terjadi pembiayaan jenis ini memiliki porsi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif, yaitu *murabahah*. Menurut Muhammad hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di sebagian besar bank syariah di dunia, kecuali Sudan dan Iran.²⁶

BPRS Artha Fisabilillah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga ikut andil dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sejak kehadirannya pada tahun 1994. Sebagai lembaga keuangan syariah yang terikat aturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS Artha Fisabilillah diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, BPRS Artha Fisabilillah pada periode tahun 2011 – 2016 tercatat porsi pembiayaan di dominasi oleh pembiayaan *murabahah* dengan prosentase 99,912%, sedangkan

²⁵ http://www.kompasiana.com/ranangajisp/optimalisasi-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah_54fd6712a33311022150fd10, (diakses pada 30 Maret 2017, pukul 14.22 WIB).

²⁶ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 2.

penyaluran pembiayaan *mudharabah* hanya 0,0009% dari total pembiayaan yang disalurkan pada periode tersebut. Tidak hanya sampai di situ, realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah didapati tidak aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Risiko

Bank sebagai *shahibul maal* menghadapi risiko ketidak jujuran nasabah sebagai *mudharib*. Karakteristik dari *mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha yang dilakukan *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan dalam *assessment* maupun *control* terhadap pembiayaan yang diberikan.

Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan *mudharabah* karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collateral*), adanya risiko penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek.

2. SDM

Perkembangan perbankan syariah tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia (insani) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak SDM yang selama ini terlibat dalam institusi syariah, tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme

perbankan syariah itu sendiri. Kendala internal memegang andil yang cukup sentral terhadap rendahnya realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah. Rumitnya proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk menagnani, memproses, memonitor, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.

3. Tingkat Peminatan

Faktor lain yang mempengaruhi realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah yaitu tingkat peminatan masyarakat terhadap produk tersebut. Namun terkait tingkat peminatan ini masih harus dianalisa lebih dalam karena hal ini terjadi bisa diakibatkan faktor lainnya, apakah itu dari internal bank, eksternal atau keduanya.

Itulah diantara faktor dan kendala yang berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Rendahnya realisasi pembiayaan *mudharabah* menggambarkan bahwa operasional bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kecenderungan yang terjadi bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk *mudharabah* sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri.

Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk *mudharabah* bukan hanya terfokus pada produk jual beli. Keunggulan bank syariah justru pada

produk *mudharabah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kesetabilan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui jiwa-jiwa berani dan kreatif dari para pengusaha atau calon-calon pengusaha, akan tercipta kreativitas dan juga peningkatan nilai tambah dalam perekonomian. Namun demikian upaya meningkatkan kewirausahaan ini jelas merupakan salah satu upaya yang membutuhkan ketersediaan modal atau dana, membutuhkan sumber daya manusia yang andal, juga kebersamaan dan saling bertanggung jawab dengan sesama.

Oleh karena itu, stigma dominasi produk pembiayaan *murabahah* harus mulai dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan *mudharabah*. Menurut Monzef Kahf, secara khusus *mudharabah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya.²⁷ Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Di sinilah mestinya perbankan syariah harus lebih berperan. Bagaimana mestinya perbankan syariah mampu mendorong lahirnya para wirausahawan dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Namun dalam realisasinya perbankan syariah terkesan mandul. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan rendahnya realisasi pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah, padahal *mudharabah* merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Dalam praktiknya perbankan syariah justru suka lebih bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat mendapatkan

²⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

keuntungan, padahal di samping sebagai lembaga yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi label syariah yang diusungnya, yaitu misi sosial dalam artian mensejahterakan umat.

Dengan gambaran kondisi penyaluran dana dalam perbankan syariah seperti itu, disinyalir adanya kontradiksi dengan tujuan ekonomi syariah yang begitu luhur. Adapun tujuan gerakan ekonomi syariah secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Puncak dari tujuan tersebut adalah tercapainya kehidupan yang *maslahah*, kehidupan yang bernilai *falah* baik di dunia maupun di akhirat. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktik aniaya, terwujudnya perekonomian yang maju dan bermartabat, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif. Tujuan-tujuan tersebut kemudian banyak yang dicanangkan sebagai misi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.

Di samping itu, UU No. 21 Tahun 2008 yang merupakan payung hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perbankan syariah menyebutkan bahwa tujuan dari didirikannya bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perbankan syariah dalam segala aspek operasionalnya harus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana hal itu dapat direalisasikan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sifatnya produktif yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Ketersediaan pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup *urgent* baik secara mikro maupun makro.²⁸ Urgensi yang bersifat mikro antara lain : memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Sedangkan urgensi secara makro adalah : peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru.

Urgensi atau manfaat-manfaat tersebut ternyata selaras dengan tujuan ekonomi syariah dan juga tujuan bank syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan tujuan ekonomi syariah serta tujuan perbankan syariah itu sendiri.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup:

²⁸ Abdul Hakim, “Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)”, dalam Jurnal UIN Surabaya, tt.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor PT BPRS Artha Fisabilillah yang berlokasi di Jl. Raya Bandung No.75 Sadewata Kabupaten Cianjur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Desember tahun 2017.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁹ Adapun pendekatan studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Alasan menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah* dan harmonisasinya dengan tujuan ekonomi Syariah serta tujuan bank Syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24.

- a. Data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri Komisaris, *Account Officer* (AO), *Human Resources Development* (HRD), laporan aset pembiayaan BPRS Artha Fisabilillah.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa jurnal, skripsi, catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³⁰ Dalam Penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (*internal sampling*) dan sampling waktu (*time sampling*).³¹ Sampling internal dilakukan terkait apa yang diteliti oleh penulis mengenai Pelaksanaan dan Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* serta Dinamika Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah. Dengan siapa akan melakukan wawancara, data hasil wawancara yang dilakukan dengan komisaris dan *Account Officer* (AO), laporan aset pembiayaan di BPRS Artha Fisabilillah juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan *sampling* waktu menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai prosedur pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah*.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai Bapak Fikri sebagai komisaris dan Bapak Dadan sebagai *staff Account Officer* pembiayaan di BPRS Artha Fisabilillah. Sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan jika dirasa perlu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumentasi ini seperti, sejarah lahirnya lembaga BPRS Artha Fisabilillah, jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah perorangan dan mekanisme/model-model pembiayaan *mudharabah*, laporan keuangan BPRS Artha Fisabilillah dari tahun 2011-2016.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan dan realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Artha Fisabilillah selama periode tahun 2011-2016.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil.